



PENETAPAN

Nomor **123/Pdt.P/2024/PA.Mw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penggembala Kambing, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: e-Mail, No. HP: 08xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Riau, XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: e-Mail, No. HP: 08xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 123/Pdt.P/2024/PA.Mw, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jaka Alvian, dengan mahar berupa seperangkat alat salad dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Edi Waluyo dengan saksi nikah masing-masing bernama Suwarno dan Sukar, dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 13 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan dari awal sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai **4 (empat)** orang anak:
 - a. ANAK, perempuan, lahir di XXXX, tanggal XXXXXX;
 - b. ANAK, laki-laki, lahir di XXXX, tanggal XXXXXX;
 - c. ANAK, laki-laki, lahir di XXXX, tanggal XXXXXX;
 - d. ANAK, laki-laki, lahir XXXX, tanggal XXXXXX;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan berkas persyaratan dari Para Pemohon tidak lengkap;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari, guna mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan memeriksa identitas para Pemohon dan telah ternyata sesuai dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi:

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Atibo Manimeri, RT 003, RW 001, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah tanggal 06 Juni 2008 di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid bernama Edi Waluyo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jaka Alvian sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suwarno dan Sukar dengan mas kawinnya berupa seperangkat Alat Sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;
 - Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan itsbat nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Irmawati binti Laurens Padwa**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Atibo Manimeri, RT

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw



003, RW 001, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah tanggal 06 Juni 2008 di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid bernama Edi Waluyo;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jaka Alvian sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suwarno dan Sukar dengan mas kawinnya berupa seperangkat Alat Sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan itsbat nikah

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan itsbat nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus buku kutipan akta nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Manokwari, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manokwari, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2) dan sesuai pula Pasal 175 RBg saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan itsbat nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah tanggal 06 Juni 2008 di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
5. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid bernama Edi Waluyo;
6. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jaka Alvian sebagai kakak kandung Pemohon II Pemohon

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suwarno dan Sukar dengan mas kawinnya Perangkat Alat Sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;
9. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
10. Bahwa selama masa pernikahannya para Pemohon belum pernah bercerai dan para Pemohon tetap beragama Islam;
11. Bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Manokwari;
2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara itsbat nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Manokwari, dan keduanya mengajukan perkara itsbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذ كرصحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam,

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya pernikahan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : (a). perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan pernikahannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 *jo.* Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim akan menetapkan tempat pencatatan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008, di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Mw



Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Proses/ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3	Panggilan	:	Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)